



Bali Post/kmb38

MISKIN - Warga miskin di Buleleng masih banyak yang belum tercatat. Hal ini ditemukan setelah Dinas Sosial melakukan pemutakhiran terhadap data kemiskinan di daerah ini.

Ribuan KK Belum Tercatat sebagai RTS

Singaraja (Bali Post) -

Pemutakhiran data warga miskin yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng menemukan lebih dari 38 ribu kepala keluarga (KK) kurang mampu yang belum tercatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS - red). Pemutakhiran ini masih berlanjut hingga bulan ini, sehingga dipastikan jumlah warga yang tercecer itu akan bertambah.

Data sementara di Dinsos Buleleng, warga miskin di Bali Utara yang tercatat sesuai hasil pendataan dari Program Perlindungan Sosial Sejahtera tahun 2011, lebih dari 41 ribu. Namun dari hasil pemutakhiran yang gencar dilakukan belakangan ini, masih ada warga miskin yang justru belum tercatat dalam daftar Program Perlindungan Sosial Sejahtera tersebut. Pemutakhiran data ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung serta mencatat warga miskin di seluruh desa/kelurahan di Buleleng.

Memasuki awal bulan ini, upaya pemutakhiran data kemiskinan telah mencapai 90 persen. Dari persentase itu, Dinsos mencatat jumlah warga miskin yang belum tercatat berdasarkan fakta riil di lapangan jumlahnya lebih dari 38 ribu KK.

Dihubungi Minggu (2/8) kemarin, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Gede Komang, M.Si. mengatakan, selama proses pemutakhiran itu, di beberapa desa sudah ada

penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya di desa lain justru jumlah KK miskinnya mengalami peningkatan. Selain itu, di beberapa desa lagi ditemukan jumlah angka kemiskinan justru stagnan atau tidak ada penurunan maupun kenaikan. "Dari data pemutakhiran sementara, kemungkinan besar angka kemiskinan itu tidak beda jauh dari angka yang sudah tercatat sebelumnya," katanya.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan itu karena aparat desa setempat dan warganya mampu memaksimalkan program yang digulirkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Pemkab Buleleng. Sebaliknya, kemiskinan yang membengkak faktor pemicunya diprediksi karena program yang dijalankan oleh aparat desa yang bersangkutan kurang fokus. "Dari analisis kami, bisa jadi karena faktor program penanganan kemiskinan yang kurang fokus sehingga angka kemiskinan membengkak," imbuhnya.

Di sisi lain, pejabat asal

Desa Tajakula ini mengatakan, data hasil pemutakhiran ini akan diuji secara terbuka kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat seandainya dari pemutakhiran itu masih ada data yang tercecer, sehingga akan disempurnakan kembali sebelum data tersebut ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Penetapan data akan dilakukan diawali di desa/kelurahan dan dilanjutkan ditetapkan di kabupaten sebagai data kemiskinan di Buleleng. Data ini akan dijadikan sumber oleh pemerintah kabupaten untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. "Masyarakat bisa mencocokkan kembali data ini di kantor perbekel. Dalam seminggu nantinya kalau ada yang tercecer akan diakomodir dengan pendataan ulang dan sebaliknya yang tidak layak akan disempurnakan, sehingga data ini benar-benar riil dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas mantan Kepala Badan KB-PP Pemkab Buleleng ini. (kmb38)

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal : 11